

## HEGEMONI KOLONIAL PEMERINTAHAN DAENDELS TERHADAP PERKEMBANGAN DINASTI KESULTANAN CIREBON

**Muhammad Reza Satria Dewangga<sup>1</sup>; Hisyam Varian Satyandy<sup>2</sup>; Emadiana<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>1</sup>[mrezasatria654@gmail.com](mailto:mrezasatria654@gmail.com)

### Abstrak

Pada zaman Kesultanan, Cirebon dikenal sebagai kota pelabuhan ekonomi yang maju, keberhasilan dagang mampu memajukan kota ini. Namun kejayaan Kesultanan tersebut tidak bertahan lama, kedatangan Belanda membuat kedudukan Kesultanan Cirebon semakin menurun dan kedekatan beberapa anggota keluarga Kesultanan dengan Belanda juga menjadi penyebab melemahnya kekuasaan Cirebon hingga keruntuhan Kesultanan pada akhir abad ke 17. Pada masa Pemerintahan Belanda menjadikan kondisi wilayah Cirebon tidak lagi sebagai kota pelabuhan yang murni, melainkan menjadi pelabuhan dagang yang dapat dimonopoli oleh pihak kompeni. Kekuasaan kolonial ini menghilangkan eksistensi sultan sebagai penguasa Cirebon, sehingga sultan tidak lagi menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan. Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui kondisi lebih mendalam Cirebon pada abad ke-17, dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Cirebon, dan dampak yang ditimbulkan atas keterlibatan kolonialisme pemerintahan Daendels di Cirebon.

**Kata kunci:** Cirebon; Kolonial; Daendels.

### Pendahuluan

Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan di daratan utara pulau Jawa bagian barat pada abad ke 15 sampai 16, dan merupakan tempat penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Kesultanan Cirebon didirikan di Dalem Agung Pakungwati sebagai pusat pemerintahan negara islam. Kesultanan Cirebon mampu bertahan selama 3 abad, sejak diakuinya Walangsungsang sebagai *Sri Mangana*, penguasa Cirebon pada 1430 M hingga terjadinya kisruh kekuasaan akibat suksesi tahta sultan. Dekatnya sebagian keluarga kesultanan Cirebon dengan Belanda menyebabkan melemahnya kekuasaan

Cirebon, terlebih perkara wibawa diantara keluarga besar kesultanan Cirebon semakin mempercepat keruntuhan kesultanan Cirebon pada akhir abad ke 17 (Sobana, 2011).

Dalam kurun waktu abad ke 17, Cirebon bertransformasi dari daerah yang semula mandiri menjadi daerah yang berada di bawah pengaruh pihak lain. Mataram, Banten, dan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) bergantian menjadi kekuatan yang mendominasi Cirebon. Rangkaian perjanjian yang disepakati oleh Cirebon dan Belanda membuat kedudukan Cirebon semakin menurun, karena secara politis maupun militer, Kompeni telah menjadikannya sebagai sebuah daerah protektorat yang berada di bawah kewenangannya, hal ini menjadikan kedudukan Sultan Cirebon tidak lagi menjadi kekuatan yang penting karena digantikan oleh kompeni. Peran sultan yang dulunya sebagai tolok ukur dalam pemerintahan Cirebon menjadi tergeser dan lebih berorientasi ke dalam untuk mengurus budaya dan agama. Pada masa pemerintahan Daendels, Cirebon turut menjadi wilayah yang terpengaruh dalam kehidupan kolonial imperialisme, nampak dari keikutsertaan dan ikut campur kolonial dalam urusan pemerintahan kerajaan sebagai bentuk upaya melakukan intervensi terhadap politik keraton. Di bawah pemerintahan kompeni Belanda, Cirebon mengalami permasalahan sosial dan ekonomi pada abad ke-18, dan terjadinya bencana kelaparan dan kerusakan lembaga-lembaga sosial, sehingga membuat keadaan Cirebon menjadi miskin (Sulendradiningrat, 1985). Terjadinya penjualan diri untuk menjadi budak secara besar-besaran, yang berdampak pada perekonomian masyarakat Cirebon sampai terjadinya wabah penyakit dan kelaparan yang menyerang masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan yang hadir mengenai pengaruh hegemoni kolonial terhadap Kesultanan Cirebon, diperlukan metode penelitian yang tepat dan kritis. Sebagaimana apa yang melatarbelakangi disusunnya tulisan ini, maka metode penulisan yang dirasa tepat dan sesuai adalah dengan penalaran induktif dengan pengkajian yang kualitatif. Penalaran induktif merupakan penalaran yang didasarkan pada fakta-fakta yang didapatkan dan gejala sosial yang bersifat khusus untuk kemudian dianalisis serta dihubungkan antara satu sama lain sebagai generalisasi peristiwa (Tanudirjo, 1987).

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode sejarah karena objek penelitian adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Masa lampau termanifestasi melalui dokumentasi akan realitas pada masanya yang terdapat pada sumber arsip serta dokumen

sejarah. Oleh karena itu, terdapat patokan dan prosedur khusus yang harus dilakukan di dalam penelitian yang berhubungan dengan sejarah yaitu metode penelitian sejarah atau metode historis (Sjamsudin, 2012). Daliman memaparkan empat prosedur metode sejarah yaitu heuristik, kritik (verifikasi), interpretasi, dan historiografi (Daliman, 2012). Heuristik merupakan langkah pertama yaitu kegiatan mencari sumber-sumber sejarah dengan tujuan mendapatkan data-data, materi sejarah atau evidensi sejarah (Sjamsudin, 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pasca keruntuhan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada 31 Desember 1799, secara resmi kekuasaan kolonialisme imperialisme beralih ke tangan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui institusi baru *Nederlandsch Oost-Indie* dengan jabatan tertinggi adalah *Gouverneur-Generaal* sebagai wali dari pemerintahan pusat di Belanda. Jabatan ini pertama diserahkan kepada Herman Willem Daendels yang memerintah pada kisaran tahun 1811-1818 M (Vlekke, 2008). Daendels sendiri menerima jabatan ini setelah sebelumnya berpihak pada Perancis yang kala itu Tengah merevolusi kerajaan-kerajaan di Eropa. Sehingga dengan kata lain, pemerintahan pusat yang dimaksud menjadi pusat dari pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara saat itu merujuk pada pemerintahan Prancis Belanda dibawah pimpinan Kaisar Napoleon Bonaparte (Klerck, 1938).

Daendels menerima dua tugas utama dari Louis Napoleon (1778–1846), selaku adik dari Kaisar Perancis. Pertama, melindungi pulau Jawa dari ancaman penaklukan dan penguasaan Inggris yang menjadi musuh utama dari Prancis sebagai konflik turunan Perang Napoleon. Tugas kedua adalah merombok sistem administrasi yang telah berjalan sebelumnya di Jawa. Perombakan yang ia lakukan ini pun dapat dikatakan berhasil dan bersifat revolusioner. Hal ini tentu sangat didukung dengan pengalaman Daendels sendiri yang mengalami banyak kondisi dari yang sebelumnya ia merupakan salah satu dari ribuan orang Belanda yang diusir oleh gerakan kontra-revolusi yang dikontrol Prusia (Vlekke, 2008). Lalu kemudian bergabung dan berpihak pada Perancis dalam revolusi sistem kerajaan di Eropa. Revolusi yang dilakukan oleh Daendels menjadi kenangan tersendiri yang turut mengubah setidaknya sistem administrasi dan pemerintahan lokal di Nusantara, khususnya Jawa dan Sumatra saat itu. Daendels sendiri yang dikenal sangat anti-feodalisme, membawa pengaruh besar pada kekuasaan lokal termasuk pada pemerintahan Kesultanan Cirebon yang pada masa itu telah terbagi dalam beberapa dinasti kekuasaan.

### **Cirebon Sebelum Daendels**

Kesultanan Cirebon merupakan sebuah kesultanan Islam yang terletak di wilayah yang kini dikenal dengan Cirebon pada abad 15 dan 16, yang menjadi pangkalan pelabuhan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Letaknya yang berada di antara kebudayaan Jawa dan Sunda Pajajaran, menjadikannya membentuk percampuran kebudayaan tersendiri yang disebut kebudayaan *Jawa-Sunda Sawareh* atau sebagian Jawa-Sunda. Secara etimologis, Cirebon berasal dari dua asal-usul kata yakni *Caruban* dan *Ci-Rebon*. *Caruban* seiring waktu berubah menjadi *Carbon*, *Cerbon*, dan *Cirebon*. Proses ini sangatlah wajar sebab pengucapan bahasa mengalami proses perubahan yang dinamis. Sedangkan *Ci+Rebon* berasal dari kata *Cai* yang berarti air dan *rebon* yang berarti udang-udang kecil sebagai bahan pembuatan terasi (Rosidi & Foundation, 2000). Dalam historiografi tradisional yang berkembang di masyarakat, wilayah ini sebelumnya dikenal dengan nama Tegal Alang-Alang atau Kebon Pesisir, yang awalnya merupakan hutan yang dibabat menjadi pedukuhan. Kepala desa atau *kuwu* pertama adalah Ki Gede Alang-alang (Paman dari Nyai Indang Geulis). Setelah Ki Gede Alang-alang meninggal dan digantikan Ki Samadullah, kemudian berganti nama menjadi Pangeran Cakrabuana (Lubis, 2000). Pada masa ini, kekuasaan atas Cirebon masih berada di bawah pemerintahan kerajaan Pakuan Pajajaran (Lubis & dkk, 2000).

Pertumbuhan dan perkembangannya menjadi sebuah kerajaan Islam terjadi dimulai ketika dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ia juga dipercaya sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Banten hingga akhir abad ke 17. Selain itu, penyebaran agama Islam di hampir seluruh wilayah Jawa Barat seperti Kuningan, Majalengka, Sukabumi, Kawali (Galuh atau Sumedang), hingga Sunda Kelapa diyakini berpuncak keilmuan kepada Sunan Gunung Jati. Ia sendiri memerintah sejak tahun 1479 M hingga 1568 M menggantikan Pangeran Cakrabuana, selaku paman dan penguasa Caruban Larang yang berpusat di Keraton Pakungwati. Setelah dirinya wafat dan dikebumikan di Pesarean Agung Gunung Sembung, beberapa calon kuat pengganti diajukan sebagai penerus dinasti kesultanan Cirebon (Sulendradiningrat, 1985).

Calon-calon yang diajukan sebagai pengganti Sunan Gunung Jati, sultan Kerajaan Cirebon Larang sendiri terdiri dari Pangeran Pasarean, putra Sunan Gunung Jati dengan Nyi Mas Tepasari dan Pangeran Dipati Cirebon, putra Pangeran Pasarean yang berarti cucu dari Sunan Gunung Jati. Namun, kedua calon tersebut meninggal terlebih dahulu sebelum menaiki tahta. Beberapa peneliti berpendapat suksesi kemudian jatuh kepada Pangeran

Fatahillah, tetapi hanya memerintah selama dua tahun. Kemudian pemerintahan kembali lanjut kepada putra Pangeran Dipati Cerbon yakni Pangeran Emas, selaku cicit Sunan Gunung Jati dengan gelar Pangeran Ratu 1 yang memerintah selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649 M (Sobana, 2011).

Salah satu babak penting bagi Cirebon, hadir karena pengaruh besar *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Kesultanan Cirebon dan segenap pemerintahan tradisional di Nusantara menghadapi permasalahan-permasalahan krusial baik terkait kewilayahan, ekonomi, politik, hingga terkait suksesi pemerintahan. Dibawah pengaruh VOC, Cirebon dihadapkan pada keputusan-keputusan penting yang memaksa keadaan Cirebon untuk menjalin hubungan yang terikat dengan pihak VOC. Ditandai dengan perjanjian yang terjadi pada 7 Januari 1681 menandakan adanya hubungan dengan VOC, yang kemudian berlanjut dengan perjanjian-perjanjian secara runtut pada 1681, 1685, 1688, dan 1699 (Johari, 2018). Melalui rentetan perjanjian ini, dapat disimpulkan sejak perjanjian pertama pada paruh awal 1681, Cirebon telah mengikat kebutuhan ekonomi-politiknya dengan VOC.

Perpecahan Cirebon menjadi beberapa bagian dinasti dimulai setelah wafatnya Pangeran Girilaya pada 1662 M. Perpecahan terjadi pada saat Sultan Ageng Tirtayasa (Sultan Banten) setelah membebaskan kedua putra Pangeran Girilaya melalui Raden Trunojoyo dengan menitahkan Pangeran Martawijaya (Pangeran Samsudin) sebagai Sultan Sepuh (Keraton Kasepuhan) yang pertama dan Pangeran Kertawijaya (Pangeran Badrudin) sebagai Sultan Anom (Keraton Kanoman). Di lain sisi, Pangeran Wangsakerta kemudian mendirikan sebuah paguron (perguruan keilmuan) di Kaprabonan dan dikenal sebagai Panembahan Cirebon (Sulendradiningrat, 1985).

Perpecahan kedua muncul setelah Sultan Anom 1 meninggal dunia pada 1723 M dan kemudian memunculkan suksesi pemerintahan yang dahsyat. Putra pertamanya menjadi pengganti ayahnya sebagai Sultan Anom II (Sultan Anom Muhammad Chadiruddin). Putra keduanya yakni Pangeran Raja Adipati Kaprabonan mendirikan keraton Kaprabonan dengan gelar rama Guru Pangeran Raja Adipati Kaprabonan. Hal ini pun hingga sekarang masih menimbulkan banyak pendapat yang saling bersilangan terkait keberadaan 4 pecahan dinasti Kesultanan Cirebon dan keabsahannya sebagai penerus biologis Sunan Gunung Jati. Perpecahan yang dihadapi oleh dinasti Cirebon ini pun juga turut dicampuri oleh campur tangan asing baik ditangan VOC maupun pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya dengan keluarnya *besluit* yang berisi pengangkatan Pangeran Raja

Kanoman sebagai Sultan Cirebon pada tahun 1807 M (Jamil, 2013). Tahta yang dilimpahkan ini dibatasi oleh keputusan bahwa anak dan cucu keturunan Pangeran Raja Kanoman (penguasa Cirebon) tidak berhak atas gelar Sultan. Gelar yang dilimpahkan kemudian adalah gelar pangeran hingga terus-menerus hingga penggantinya. Sedangkan tahta utama atas keraton Kanoman dijabat oleh Sultan Anom V. Hal ini menandakan terbentuknya suatu dinasti baru Cirebon yang merupakan pecahan dari Kanoman yakni Cirebon.

### **Cirebon Pada Masa Pemerintahan Daendels**

Pemerintahan terhadap tanah kolonial Hindia Belanda di tangan Daendels selaku pejabat pemerintahan yang berkuasa penuh atas Jawa, dalam hal ini membawa perubahan yang cukup signifikan dalam jalannya pemerintahan lokal di tangan para Sultan, Pangeran, dan Bupati. Tidak hanya melalui keluarnya surat keputusan (*besluit*), aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial di tangan Gubernur Jenderal pun memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa masyarakat termasuk otoritas lokal untuk turut menaatinya. Daendels sendiri dipandang memerintah dengan karakter yang sentralistik, dimana Ia menjalankan pemerintahan langsung tanpa melalui perantara bupati atau sultan. Ini nampak pada tanggal 2 Februari 1809, pemerintah mengeluarkan *besluit* yang berisi keputusan atas penghapusan kekuasaan politik yang dimiliki oleh sultan-sultan Kasepuhan, Kanoman, Cirebon, dan Kaprabonan. Jabatan-jabatan tersebut pun dilebur menjadi jabatan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sekalipun demikian, secara tradisional, jabatan Sultan dan punggawanya masih tetap dilestarikan sebagai penjaga tradisi di keraton-keraton dan situs-situsnya. Jabatan sultan hanya sebatas nama, itupun setiap sultan yang diangkat memerlukan persetujuan berupa *besluit* pengangkatan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial.



Gambar 1: Surat Besluit dari Gubernur Jenderal untuk Pangeran Muhammad Khaerudin mengenai pengangkatannya sebagai Sultan Cirebon (Sultan Cirebon ke-8). Sumber:

<https://eap.bl.uk/archive-file/EAP211-1-3-40>

Dengan penghapusan jabatan atas sultan tersebut, maka sama halnya dengan meruntuhkan kekuasaan lokal atas tanah-tanah *apanage* milik kesultanan. Kepemilikan atas kesultanan menjadi terbatas pada wilayah keraton, pesarean Gunung Sembung (makam Sunan Gunung Jati) yang dimiliki bersama oleh 4 dinasti, dan tanah-tanah milik pribadi sultan serta pangeran. Wilayah Cirebon sendiri kemudian turut terbagi dalam wilayah-wilayah yang dibagi oleh Daendels menjadi 3 bagian, yaitu: (1) Batavia dan *Jascatrasche-Preanger Regenstschappen*, (2) Kesultanan Cirebon dan *Cheribonsche Preanger Regenstschappen*, (3) Pesisir Utara bagian Jawa bagian Timur (*Noord Oostkust*) dan wilayah ujung timur Pulau Jawa (*Oosthoek*). Dari pembagian ini, sudah jelas bahwa Cirebon terbagi dalam suatu bentuk wilayah karesidenan yang dipimpin oleh seorang Residen berkebangsaan Belanda (Jamil, 2013).

Di bawah komando residen, Cirebon kemudian dibagi menjadi 2 wilayah administrasi yang terdiri dari wilayah kesultanan Cirebon di bagian utara (Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Gebang) dan wilayah Priangan di Selatan (Limbangan, Sukapura, dan Galuh). Tanah kesultanan tetap menjadi milik pemerintah kolonial, sekalipun sultan-sultan Cirebon memiliki kekuasaan yang terbagi-bagi di dalam wilayahnya. Hal ini dikarenakan, jabatan sultan menjadi terbatas akibat Keputusan Daendels yang membatasi kekuasaannya hanya sebagai pegawai kolonial setara bupati yang diangkat dan diberhentikan oleh Residen (Sunardjo, 1983). Dengan kata lain,

beberapa deretan bupati yang memerintah di tanah Pasundan diisi oleh keluarga-keluarga dinasti Cirebon. Menurut A.A. van Heusden (1863), selain melakukan reformasi birokrasi, Daendels memang terkenal menjauhkan jarak antara para sultan dengan Belanda karena pemerintahannya yang tiran, tidak menghormati hukum serta adat istiadat, memberikan hukuman sewenang-wenang dan kejam. Pembagian ini tertuang dalam keputusan rapat *gubernemen* yang berisi pembagian wilayah utara menjadi beberapa kabupaten yang dipimpin oleh tiga sultan Cirebon yang sudah menjadi pegawai kolonial. Wilayah ini meliputi Kasepuhan membawahi Kuningan dan Cirebon, Kanoman membawahi Majalengka, dan Kacirebonan membawahi Indramayu.

Penentuan daerah-daerah bawahan yang dimiliki oleh masing-masing sultan ini memperlihatkan bahwasanya sultan berhak menerima sebagian wilayahnya tanpa ada campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam proses jalannya pemerintahannya. Namun, pemerintah sendiri mengatur dengan jelas jumlah rakyat (*cacah*) yang dibawahi dari luas jumlah kewilayahan yang dimiliki. Contohnya, Sultan Sepuh menerima 80.739 jiwa, Sultan Anom memperoleh 76.662 jiwa, dan Panembahan Cirebon (Keraton Kacirebonan) memperoleh sebanyak 80.250 jiwa. Menurut A.A. van Heusden (1863), selain melakukan reformasi birokrasi, Daendels memang terkenal menjauhkan jarak antara para sultan dengan Belanda karena pemerintahannya yang tirani, tidak menghormati hukum dan adat istiadat, serta memberikan hukuman sewenang-wenang dan kejam.

Sebenarnya selain Kesultanan Cirebon, Daendels melakukan intervensi terhadap kekuasaan-kekuasaan lain di Jawa, diantaranya Banten, Yogyakarta dan Surakarta (Vorstenlanden) (Marihandono, 2003). G. van Duinen (1918) mencatat bahwa Sultan Banten mengalami nasib yang sama dengan nasib Cirebon bahkan lebih tragis, begitupun para pangeran Surakarta dan Yogyakarta yang layaknya merasakan tinju besi Daendels. Bahkan ketika Sultan Hamengkubuwono II (Sultan Yogyakarta) tidak menyukai Daendels, ia digulingkan, dan diganti dengan sultan yang baru. Tahun 1810, Belanda dianeksasi dan diintegrasikan dalam Kekaisaran Perancis, tetapi kabar tersebut baru sampai di Jawa bulan Februari 1811. Bendera Perancis kemudian dikibarkan di Batavia karena Daendels adalah seorang pemimpin Jacobin dan pengagum berat Napoleon (Lombard, 2005). Jawa kemudian menjadi koloni Perancis selama beberapa bulan dan kemudian Daendels dipanggil kembali oleh Napoleon. Ia digantikan Janssens menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda melanjutkan pemerintahan Daendels dengan melakukan perubahan-perubahan lanjutan dari kebijakan yang ditetapkan oleh Daendels.

## **Dampak Perubahan Kondisi Sosial-Politik bagi Masyarakat Cirebon**

Hegemoni kolonial baik VOC, masa pemerintahan Kerajaan Hindia Belanda di bawah tangan Daendels, dan kemudian pemerintah kolonial setelahnya tentunya tidak hanya secara fungsional merubah tampilan dan tata cara kehidupan istana, namun juga turut merubah tata kelola kehidupan masyarakat yang tertuang dalam keterpengaruhannya kebijakan politik terhadap masyarakat. Membincangkan pemerintahan Daendels secara umum tidak bisa lepas dari sifat dan karakter Herman Willem Daendels yang dikenal anti-feodalisme, demokratis, namun juga otoritatif. Hal ini sangat nampak dalam upayanya melalui kebijakan yang dikeluarkan dengan membatasi peran dan kekuasaan raja-raja lokal yang sangat berkaitan dengan urusan pertanahan (*feudum*). Khususnya dalam hal ini pada Cirebon, keputusannya untuk mencabut kekuasaan sultan hanya dengan jabatan sebatas bupati menjadikan peran dan hak-hak sultan tercerabut dari akarnya. Sekalipun demikian, Louis Napoleon sendiri telah mewanti-wanti Daendels untuk lebih bersabar dan menunggu waktu untuk melakukan reformasi mendasar atas sistem yang berlaku di Jawa (Hall, 1988). Daendels memang dimungkinkan untuk berbuat demikian. Soalnya, ia dibekali kekuasaan khusus yang bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Dewan Hindia.

Hingga saat ini beberapa peneliti masih belum menemukan bukti-bukti pendukung yang mengarah pada reaksi keluarga kesultanan Cirebon terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, dibandingkan dengan pengalaman serupa yang dihadapi raja-raja di Vorstenlanden (Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran). Hubungan yang jelas antara Daendels dan sultan-sultan Cirebon tidak bisa dilepaskan dari keberadaan wacana mega proyek *De Groote Postweg* (Jalan raya Pos Anyer-Panarukan), urusan penarikan pajak, dan pelabuhan-pelabuhan penghubung di sepanjang pesisir utara Jawa. Hal ini disebabkan pada paruh awal tahun 1806 M, beberapa tokoh lokal dan pejabat-pejabat kesultanan rendahan juga diindikasikan melakukan upaya-upaya pemberontakan. Laskar-laskar bersenjata dari kalangan rakyat hadir di seantero wilayah menyebabkan kekisruhan yang luar biasa bagi pemerintah kolonial (Purnaningsih & Mulyana, 2017).

Beberapa wacana yang muncul menjadi *conflict complex* dan menyebabkan kekisruhan di Cirebon ini setidaknya terdiri dari: (1) Upaya restorasi atau menghidupkan kembali kekuasaan Sultan tidak hanya sebagai penjaga tradisi tetapi sebagai penguasa pemerintahan lokal ; (2) Rivalitas kekuasaan massa antara pihak Sultan Sepuh VII dan Sultan Anom V dengan Pangeran Raja Kanoman yang kehilangan peluang (*pulung wahyu keprabon*) pada tahun 1797 M ; (3) Perlawanan terhadap kalangan orang Cina yang

dipandang oleh petani lokal sebagai pengeksploitasi ; (4) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat kolonial melalui pungutan pajak dan biaya sewa tanah ; (5) Permintaan kompeni, pejabat kolonial, dan pejabat lokal terhadap hasil produksi dan tenaga kerja (Sobana, 2011).

Menurut Marihandono (2003), perjuangan rakyat Cirebon dan sekitarnya dipimpin oleh Raden Bagus Sidong beserta pengikutnya. Akan tetapi, pada Agustus 1806 mereka menyerahkan diri. Meskipun demikian, masih banyak tokoh yang memutuskan untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Beberapa di antara mereka adalah Demang Kuningan, Warga Kutipan, Demang Losari, Sangbaya, para mantri Gargo Minggolo, Wiriosroyo, Jurang Prawiro, Joyosemito, Ngabehi Lanlang, Raden Jareng, Bagus Kelor, Bagus Santin, Macan Putih, Bagus Manuk, dan Bagus Rangin. Belakangan, enam di antara tokoh itu bersedia berunding, bahkan meminta pengampunan. Namun, Bagus Rangin telah berangkat mengungsi ke tempat lain, bahkan bersembunyi di Gunung Haji, dan dengan kedok untuk melindungi penduduk, telah melakukan perampokan. Sosok Bagus Rangin ini hingga dikemudian hari, dari pemerintahan Daendels berganti ke tangan Raffles tetap menjadi tokoh sentral dalam perlawanan-perlawanan dengan jalan gerilya (Ma'mun & Hazmirullah, 2020).

Dalam hal ikhwal perjuangan, Bagus Rangin sendiri memiliki dasar karakter yang kuat. Hal inilah yang mungkin menjadi dasar dari dukungan rakyat kecil dan kalangan pegawai rendahan. Dalam catatan Stevens (1978), Bagus Rangin memusatkan pergerakan di Bantarjati, berlokasi di perbukitan di dekat Cirebon. Ia didukung oleh banyak sekali kepala kampung, baik berupa tenaga maupun harta benda. Bahkan, Rangin memiliki enam panglima yang sekaligus menjabat sebagai kepala kampung dan menjadikan rumah mereka sebagai tempat persembunyian. Di rumah tersebut juga dibentuk sebuah dewan, di mana seorang juru tulis merupakan bagian di dalamnya. Para pemimpin lokal memutuskan bergabung dengan Bagus Rangin, terutama bupati Indramayu, sejak ia merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Belanda. Ia juga memasok informasi tentang pergerakan pasukan penjajah. Dengan cara itu, Bagus Rangin dan kelompoknya mampu secara efektif melakukan penyergapan dan pada akhirnya memperoleh banyak sekali senjata. Selain itu, persenjataan juga diperoleh dari Pringa Wedana, putra salah seorang pemimpin lokal, yang mencuri dari gudang penjajah (Purnaningsih & Mulyana, 2017).

Selain urusan keberpihakan dengan kesultanan, proyek infrastruktur jalan Pos Anyer-Panarukan yang telah menelan banyak korban disebabkan karena pelaksanaan proyek pada

tanah rawa-rawa yang mengakibatkan timbul penyakit demam yang mematikan juga menjadi pemantik penolakan terhadap kekuasaan Daendels. Penyakit tersebut adalah malaria dan ribuan telah meninggal karenanya. Kebulatan tekad mega proyek dahsyat ini menurut Duinen (1918), sangat nampak pada figur Daendels yang menunjuk dengan tangan kirinya pada peta mega-proyek dalam lukisan Raden Saleh. Proyek besar yang menjadi wacana pembangunan besar Daendels dalam upaya menghubungkan tiap-tiap wilayah di sepanjang pesisir utara Jawa membutuhkan tenaga kerja yang besar. Proses pemenuhan tenaga kerja ini seringkali dalam historiografi populer sering disebut dengan kerja rodi atau kerja paksa.



Gambar 2: Potret diri Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (*Posthumous Portrait of Herman Willem Daendels, Governor-General of the Dutch East Indies*, karya Raden Saleh tahun 1838. Sumber: <https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-3790>

Berbeda dengan apa yang dipercaya orang selama ini, Daendels selama masa pemerintahannya memang memerintahkan pembangunan jalan di Jawa tetapi tidak dilakukan dari Anyer hingga Panarukan. Jalan antara Anyer dan Batavia sudah ada ketika Daendels tiba. Oleh karena itu menurut *het Plakkaat Boek van Nederlandsch Indië* jilid 14, Daendels mulai membangun jalan dari Buitenzorg menuju Cisarua dan seterusnya sampai ke Sumedang. Pembangunan dimulai bulan Mei 1808 di Sumedang sekalipun proyek pembangunan jalan ini terbentur pada kondisi alam yang sulit karena terdiri atas batuan cadas, akibatnya para pekerja menolak melakukan proyek tersebut dan akhirnya pembangunan jalan macet (Chijs, 1894). Akhirnya Pangeran Kornel turun tangan dan langsung menghadap Daendels untuk meminta pengertian atas penolakan para pekerja. Penolakan para pekerja muncul dalam beberapa bentuk, baik melalui pemogokan kerja

hingga fisik melalui penolakan-penolakan tokoh-tokoh dalam upaya pemberontakan. Dari sini muncullah dualisme mengenai bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi mengenai hubungan Daendels, pihak kesultanan, pejabat lokal, dan masyarakat dalam wacana-wacana kebijakan politik yang dikeluarkan.

Dibandingkan dengan nasib Banten di sisi selatan Cirebon yang mengalami nasib tragis dengan pembredelan kekuasaan yang dimilikinya. Cirebon sendiri memiliki nasib yang lebih beruntung sekalipun mesti mendapatkan imbas dengan terbaginya kekuasaannya dalam beberapa dinasti. Kepala pejabat Kesultanan Banten tersebut dijatuhi hukuman mati oleh Belanda dengan cara ditembak dan tubuhnya dilemparkan ke laut untuk menebar teror menakuti rakyat maupun kalangan istana yang mencoba melawan Belanda (Arifin, 2021). Dalam kondisi tersebut, benda pusaka dan berharga Keraton Banten dijarah oleh pasukan Daendels. Daendels sendiri mencatat dengan rinci bahwa perhiasan, emas, perak, uang tunai, muatan-muatan yang belum dibongkar, dan barang apapun lainnya yang dianggap bernilai dan ditemukan di Keraton Banten, akan dibagikan kepada para pasukan dan semua yang terlibat dalam ekspedisi militer pengepungan Banten, dengan pengecualian enam keris yang dianggap berharga, akan dikirimkan ke ruang kas perbendaharaan besar di Batavia. Sedangkan bagi Cirebon, hingga saat ini masih belum ditemukan bukti mengenai keadaan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan dari penerimaan keluarga kesultanan terhadap keputusan *besluit* yang dikeluarkan. Namun secara diam-diam menjadi pemantik protes gerakan bawah tanah, seperti perjuangan Raden Bagus Rangin dan tokoh-tokoh lainnya yang terpusat pada *paguron-paguron* (pondok pesantren).

### **Kesimpulan**

Secara geopolitik, Cirebon memiliki letak yang strategis ditinjau dari lokasi dan keberadaannya yang dekat dengan berbagai sisi keuntungan. Selain letaknya sebagai wilayah pelabuhan dan pesisir, jarak Cirebon dengan pemerintah pusat di Batavia kurang lebih berjarak hanya 100 km. Terlebih dengan karakter pemerintahan Daendels yang terpusat di ibukota menjadikan Cirebon memiliki pandangan khusus pada diri pemerintah seperti yang dialami oleh saudara mudanya, Banten. Saat kekuasaannya melemah oleh konflik internal, kesultanan Cirebon dihapuskan (dihilangkan kekuasaannya) oleh Herman Willem Daendels melalui sebuah skenario politik yang membagi-bagi kekuasaan tokoh-tokoh penting kesultanan dalam sebuah konflik suksesi. Penelitian ini setidaknya memberikan latar belakang bagi berbagai peristiwa sejarah di Cirebon selanjutnya. Meskipun secara institusi politik kesultanan sudah dihapuskan dan hanya sebatas sebagai

penjaga tradisi. Namun semangat dan upaya untuk menghidupkan perjuangan leluhur mereka yakni Sunan Gunung Jati hadir dalam gerakan-gerakan bawah yang diinisiasi oleh keluarga kesultanan yang tersingkir, pejabat rendahan, ulama, kaum santri, dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. Hal ini dapat menjadi gambaran dasar dalam penelitian lebih lanjut terkait peristiwa-peristiwa lainnya yang terangkum sebagai perjuangan Laskar Santri Kedondong, yang hingga saat ini masih dipenuhi oleh tanda tanya dan campuran mitologis heroisme.

### **Daftar Rujukan**

- Arifin, F. (2021). Hegemoni Kolonialisme Terhadap Kekuasaan di Nusantara: Strategi Politik Daendels Meruntuhkan Kesultanan Banten Tahun 1808-1811. *Jurnal Agastya*, Vol 1 No 1.
- Chijs, J. v. (1894). *Nederlandsch Indie Plakaatboek, Viertiende deel 1804-1808*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Duinen, G. v. (1918). *Leer oekje voor de Lagere School in ndi (ge illustreerd)*.
- Hall, D. (1988). *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Heusden, P. A. (1863). *Handleiding tot de Kennis der Nieuwe Geschiedenis, voor de Kadetten van Alle Wapenen*.
- Jamil, B. P. (2013). Perpecahan Kesultanan Cirebon. *Jurnal Kalijaga*, Vol 11 Hal 33.
- Johari, A. (2018). Kesultanan Cirebon Dibawah Kekuasaan VOC Tahun 1752-1809 . *Disertasi Doktorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Klerck, E. S. (1938). *History of the Netherlands East Indies*. W.L. & J. Brusse.
- Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian I: Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, N., & dkk. (2000). *Sejarah dan Perkembangan Kota-kota Lama di Jawa Barat*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.

- Ma'mun, T. N., & Hazmirullah, H. (2020). Sepak Terjang Bagus Rangin dalam Surat Dipati Natadireja Kepada Daendels (1808). *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, 11(2), 163-178.
- Marihandono, D. (2003). Daendels dalam Naskah dan Cerita Rakyat: Cerita tentang Daendels di Pantai Utara Jawa. *Seminar Internasional Tradisi Lisan IV*, 25.
- Purnaningsih, H., & Mulyana, A. (2017). Perlawanan Bagus Rangin: Perang Nasional yang Terlupakan. *Jurnal Vactum*, Vol 6 No 1.
- Rosidi, A., & Foundation, T. T. (2000). *Ensiklopedia Sunda: Alam, Manusia, dan Budaya (Termasuk Budaya Cirebon dan Betawi)*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Sjamsudin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sobana, A. H. (2011). *Cirebon dalam Lima Zaman: Abad ke-15 hingga Pertengahan Abad ke-20*. Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
- Stevens, T. (1978). "Cirebon at the Beginning of the Nineteenth Century: an Analysis of Reactions from a Javanese Sultanate to the Economic and Political Penetration of the Colonial Regime Between 1797 and 1816. *Dalam Papers of the Dutch-Indonesian Historical Conference, held at Noordwijkerhout, the Netherlands. Leiden/Jakarta: the Bureau of Indonesian Studies under the Auspices of the Dutch and Indonesian Steering Committees of the Indonesian Studies Program*.
- Sulendradiningrat, P. (1985). *Sejarah Cirebon*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sunardjo, R. U. (1983). *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cirebon 1479-1809*. Bandung: Tarsito.
- Tanudirjo, D. A. (1987). Ragam Metode Penelitian Arkeologi. *Laporan Penelitian. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gajah Mada*.
- Vlekke, B. H. (2008). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.